

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah adalah bagian dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut adalah ***“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera”*** yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek yang berbasis potensi local serta pemantapan imtaq
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance).
4. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah.
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Adapun fokus pembangunan pada tahap kedua RPJPD Provinsi Kepulauan 2005-2025 meliputi:

1. Pengembangan potensi ekonomi yang dimilikinya akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, meliputi pengembangan perkebunan, perikanan dan pariwisata, serta sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan.

2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan).
3. Penyediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur non fisik adalah penyiapan peraturan-peraturan dan juga perangkat-perangkat sumber daya manusianya.
4. Penanganan kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan timah dan penataan kembali lingkungan hidup pasca pertambangan, serta pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAQ.
6. Perwujudan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 pada dasarnya adalah jabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan jabaran dan sinkronisasi tersebut, maka prioritas bidang pembangunan untuk periode 2012-2017 adalah:

1. Ekonomi
2. Sosial, Politik dan Sumber Daya Manusia
3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Sarana dan Prasarana
5. Pemerintahan

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah :

“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.

Setidaknya ada enam makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. **Mandiri** menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi.
3. **Maju** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. **Berkeadilan** adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan

sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.

5. **Sinergitas dan konektivitas** dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
6. **Daya saing** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 yaitu:

1. **Mengembangkan ekonomi kerakyatan** melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral.
2. **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang** dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan

refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.

4. ***Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh*** untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. ***Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government*** melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

3.2. Telaahan RPJP Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJPN) 2010-2025 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 telah menetapkan.

3.2.1 Visi

Berdasarkan kondisi umum bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian maka visi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 2025 adalah:

“TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tersebut mengarah pada kerangka Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dalam rangka turut memenuhi amanah yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional, maka visi pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus

dapat dipahami dan diukur dengan jelas untuk mengetahui kontribusi nyatanya dalam mencapai produktivitas, kemandirian, daya saing dan kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi.

3.2.2. Misi.

3.2.2.1. Ketenagakerjaan.

Untuk mendukung terwujudnya tenaga kerja yang produktif, mandiri, berdaya saing dan sejahtera, langkah yang ditempuh antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja.
2. Menciptakan Hubungan Industrial yang Harmonis.
3. Menegakkan Norma Ketenagakerjaan.
4. Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan.
5. Mengembangkan SDM Aparatur Ketenagakerjaan.

3.2.2.2 Ketransmigrasian.

Pembangunan transmigrasi periode 2010-2015 diarahkan untuk mengembangkan potensi sumberdaya wilayah terutama di luar pulau Jawa menjadi kawasan transmigrasi yang berfungsi sebagai klaster-klaster system pengembangan ekonomi wilayah. Dengan demikian, kawasan transmigrasi berperan sebagai motor penggerak pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Sejalan dengan itu, misi pembangunan transmigrasi periode 2010-2025 adalah sebagai berikut:

1. Membangun kawasan transmigrasi.
2. Melaksanakan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi.
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi lokal kawasan transmigrasi yang berdaya saing.

4. Mengembangkan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan.
5. Menciptakan iklim kondusif bagi terwujudnya integrasi masyarakat di kawasan transmigrasi.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan analisis situasi, misi dan visi, Isu-isu pengembangan dirumuskan menjawab tantangan yang terkait dengan pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain:

1. Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Beberapa isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan, antara lain masih belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK), secara maksimal, masih belum terpenuhinya kebutuhan instruktur di BLK, masih perlunya penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, belum sinkronnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah, masih lemahnya lembaga hubungan industrial, terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih banyaknya anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, masih rendahnya kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri, masih tingginya tenaga kerja asing (TKA), rendahnya perlindungan bagi pekerja di luar negeri, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan luar negeri yang tidak bias diisi oleh tenaga kerja daerah akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja.
2. Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum clear and clean,

masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi, serta belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi.

3. Keberadaan sumber daya Disnakertrans, yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas- tugas dan peran Disnakertrans dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.
4. Seluruh sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya itu harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. Salah satu contoh adalah potensi SDM yang berlatar belakang pendidikan yang sangat memadai.

3.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdampak perlunya penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 agar dapat menjawab perubahan dan tantangan pembangunan nasional. Sebagai penyempurnaan dari Rencana Strategis 2007-2012, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun kembali Renstra tahun 2012 – 2017 yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan secara nasional, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung sebagai salah satu instansi yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, merencanakan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan, serta pengembangan ekonomi local dan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar, serta percepatan pembangunan daerah.

Secara lebih spesifik, upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk:

1. Penciptaan kondisi kerja yang layak (*decent work*), dalam pengertian produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai.
2. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan.
3. Peningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja.
4. Melaksanakan penegakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional.
5. Pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja.
6. Peningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
7. Penciptaan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah.
8. Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya.
2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya.
3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada.
4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi.
5. Membangun keterkaitan antara Kota dan desa di kawasan transmigrasi.

Namun demikian, seiring dengan kemajuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ternyata masih banyak masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang belum terselesaikan dengan cukup baik.